

## ABSTRAK

Penelitian tentang ilmu politik tentunya sangat beragam, kompleks, dan multidimensional. Begitupun dengan penelitian ini yang membahas mengenai analisis fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) mengenai Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU IKN) yang dikhususkan pada analisis proses legislasi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Tulisan ini menghadirkan sebuah urgensi bahwasannya sebuah regulasi apapun, terkhusus sebuah UU tidak hadir secara sederhana. Didalamnya terdapat dinamika yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Secara politis, dalam pembentukan sebuah UU pasti memunculkan pro-kontra, dengan pertarungan gagasan antar individu, konfigurasi fraksi, serta komisi didalamnya. Penelitian ini menitikberatkan pada peran fraksi, yaitu Fraksi PAN DPR-RI terkait UU IKN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang dibawa adalah studi kasus dengan konsep analisis.

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria *purposive sampling*, diperoleh 6 orang sebagai informan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidangnya masing-masing untuk menganalisis fungsi legislasi F-PAN DPR RI terhadap UU IKN tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Sementara itu, metode analisis data yang digunakan adalah metode spiral Creswell. Uji keabsahan data dilakukan menggunakan *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Aspek *credibility* berfokus pada unsur ketekunan, yang tentunya tidak melupakan urgensi *transferability* yang akan diurai secara komprehensif. Pada *dependability* terjadi *cross-check* secara berkala dan teratur, serta penyajian fakta melalui *confirmability*.

Hasil dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana fungsi legislasi F-PAN berjalan dalam UU IKN. Hasil penelitian ini menghasilkan tiga poin, diantaranya dalam proses legislasi F-PAN terhadap UU IKN, F-PAN memiliki pijakan akademis dalam mengeluarkan sikapnya, hal tersebut tercermin dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan pandangan fraksi yang dikeluarkan. Kedua, F-PAN juga serius dalam mengawal isu-isu populis UU IKN terkhusus berkaitan dengan anggaran dan juga hak-hak dasar masyarakat seperti agraria. Ketiga, terdapat anomali yang penulis temukan dalam berjalannya fungsi legislasi tersebut, seperti *meaningful participation* tidak berjalan dengan baik, representasi masyarakat melalui anggota legislatif secara sistemik belum berjalan, dan juga korupsi legislasi yang muncul.

Kata Kunci: Fungsi Legislasi, Partai Amanat Nasional (PAN), Legislasi

## **ABSTRACT**

*Research on political science is certainly very diverse, complex and multidimensional. Likewise, this research discusses the analysis of the legislative function of the Indonesian People's Representative Council (DPR-RI) regarding the Archipelago Capital Law (UU IKN) which is devoted to the analysis of the legislative process of the National Mandate Party (PAN) faction. This article presents an urgency that any regulation, especially a law, does not exist simply. There are interesting dynamics in it that need further research. Politically, the formation of a law will definitely give rise to pros and cons, with a battle of ideas between individuals, faction configurations and commissions within it. This research focuses on the role of factions, namely the PAN faction of the DPR-RI regarding the IKN Law. This research uses qualitative research methods with the approach taken is a case study with the concept of analysis.*

*This research also uses data collection techniques using purposive sampling. Based on purposive sampling criteria, 6 people were obtained as informants who had the capacity and capability in their respective fields to analyze the function of the DPR RI F-PAN legislation regarding the IKN Law. The data used are primary and secondary data, obtained through interviews and documentation studies. Meanwhile, the data analysis method used is the Creswell spiral method. The data validity test was carried out using credibility, transferability, dependability and confirmability. The credibility aspect focuses on the element of persistence, which of course does not forget the urgency of transferability which will be explained comprehensively. In dependability, cross-checking occurs periodically and regularly, as well as presenting facts through confirmability.*

*The result of this research is to analyze how the function of F-PAN legislation works in the IKN Law. The results of this research produced three points, including that in the F-PAN legislative process regarding the IKN Law, F-PAN had quite an academic footing in issuing its stance, this was reflected in the Problem Inventory List (DIM) and the faction's views that were issued. Second, F-PAN is also quite serious in guarding the populist issues of the IKN Law, especially those related to the budget and also basic community rights such as agrarian affairs. Third, there are anomalies that the author found in the functioning of the legislation, such as meaningful participation not running well, community representation through legislative members systemically not yet running, and also legislative corruption that has emerged.*

*Keywords: Function of Legislation, National Mandate Party (PAN), Legislation*